

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laut Tiongkok Selatan (LTS) merupakan salah satu bagian laut terbesar dari Samudera Pasifik yang memiliki posisi geografis yang sangat strategis dan di klaim sebagai laut dengan sumber daya yang sangat berpotensi di dunia. Potensi yang terdapat di kawasan laut ini adalah ditemukannya 213 miliar barel minyak bumi dan gas alam yang berada didasar Laut Tiongkok Selatan. Adapun letak strategis dari Laut Tiongkok Selatan ini meliputi wilayah dari Singapura dan Selat Malaka, sampai ke Selat Taiwan. Luas Laut Tiongkok Selatan sekitar 3,5 juta km², dengan demikian Laut Tiongkok Selatan dinobatkan sebagai salah satu lautan terluas yang ada di antara ke lima samudera di dunia.¹

Laut Tiongkok Selatan merupakan kawasan yang secara langsung memiliki nilai ekonomis, politis, maupun strategis, yang membuatnya menjadi subjek perebutan dari enam negara.² Perebutan ini terjadi karena LTS merupakan jalur penghubung terbesar antara Benua Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan juga Samudera Hindia.³ Adapun keenam negara yang terlibat sengketa LTS adalah Tiongkok dan Taiwan yang mengklaim keseluruhan wilayah LTS dengan alasan historis, selanjutnya Filipina yang mengklaim bagian pulau Spratly, Brunei

¹ Ervan Hardoko, "Laut China Selatan, Perairan menggiurkan sumber sengketa 6 negara", Kompas.com, 13 Juni 2016
<http://internasional.kompas.com/read/2016/07/13/17401251/laut.china.selatan.perairan.menggiurkan.an.sumber.sengketa.6.negara> (di akses pada hari Senin, 22 Januari 2018)

² Kementerian Luar Negeri, "Laut Cina Selatan", <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Laut-China-Selatan.aspx> (diakses pada hari Senin, 22 Januari 2018)

³ I gede Made Dwi Jaya, "Kepentingan Vietnam dalam Konflik Laut China Selatan" E-Journal <http://www.e-jurnal.com/2016/05/kepentingan-vietnam-dalam-konflik-laut.html> (diakes pada hari Senin, 22 Januari 2018)

Darussalam mengklaim berdasarkan landas kontinen dan ZEE di Kepulauan Spratly meliputi *Lousa Reef*, klaim Malaysia atas sebagian wilayah Spratly adalah berdasarkan warisan penjajah Inggris, klaim Vietnam yang memasukan kepulauan Paracel kedalam zona teritorialnya, klaim Indonesia merupakan respon dari klaim kebijakan *Nine Dash Line* Tiongkok yang membentuk huruf U dan itu turut mencaplok Kepulauan Natuna.

Keterlibatan Negara Tiongkok dalam sengketa LTS menjadikan dinamika baru di kawasan Asia Tenggara, karena pada umumnya negara yang mengklaim adalah Negara kawasan Asia Tenggara yang dikenal memiliki hubungan kerjasama strategis dengan Tiongkok. Tiongkok saat ini adalah negara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat. Dilihat selama tiga dekade terakhir meningkat sampai 10%, capaian ini terjadi pada tahun 2010.⁴ Perusahaan manufaktur dan perkembangan teknologi Tiongkok juga berkembang dengan sangat pesat. Tiongkok juga merupakan negara dengan jumlah investasi global pada tahun 2016 sebesar 110 milyar dolar, jumlah ini mengalami kenaikan 14,7% dari tahun lalu.⁵ Tiongkok juga merupakan mitra dagang No empat bagi ASEAN. Nilai perdagangan antara Tiongkok dan ASEAN sebesar 136,5 miliar USD, investasi Tiongkok dari ASEAN lebih besar 7 miliar USD dari pada nilai ekspor Tiongkok ke ASEAN. Dari sektor perdagangan, Tiongkok pada tahun

⁴ BBC, "Pertumbuhan Pesat Ekonomi Cina dalam Angka, BBC Indonesia, 23 Desember 2015, http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/09/150910_majalah_ekonomi_cina (di akses pada 3 Maret 2018)

⁵ VOA Indonesia, "Jumlah Investasi China di luar negeri terus melonjak" VOA Indonesia.com, 10 juni 2016 <https://www.voaindonesia.com/a/jumlah-investasi-china-di-ln-melonjak-/3370169.html> (diakses pada 11 maret 2018)

2009 telah membebaskan bea masuk sebesar 6,1 miliar yuan terhadap produk ASEAN yang masuk.⁶

Hubungan Tiongkok dengan negara-negara ASEAN sudah berlangsung sejak lama, namun hubungan itu kerap kali mendapatkan sebuah sandungan akibat sengketa Laut Tiongkok Selatan. Tiongkok pada mulanya telah mengklaim bahwa gugusan pulau ataupun perairan Laut Tiongkok Selatan adalah wilayah kedaulatannya, namun hal ini menghasilkan sengketa dengan beberapa negara yang berada di sekitar kawasan tersebut. Secara historis Tiongkok menganggap bahwa LTS telah ia miliki jauh sebelum konflik ini terjadi. Bermula dari paska perang dunia ke II Jepang menyerahkan kontrolnya atas Laut Tiongkok Selatan pada perjanjian *San Francisco*, oleh karena itu Republik Tiongkok mulai memagari Laut Tiongkok Selatan dengan garis putus-putus yang membentuk huruf U (*Nine Dash Line*).⁷

Klaim ini mengakibatkan konflik antara negara-negara Asia Tenggara yang terlibat dalam Laut Tiongkok Selatan. Salah satunya adalah Filipina. Filipina mengklaim keras pernyataan Tiongkok yang mengakui sepihak atas kepemilikan Laut Tiongkok Selatan. Kekayaan alam LTS seakan menjadi perebutan harapan dalam memperbaiki perekonomian negara di sekitarnya. Filipina mengklaim adanya kepemilikan 33 Pulau Beting, Pulau Pasir, Gugus Karang dan daerah perikanan di Kepulauan Spratly seluas kurang lebih 64,9776 mil. Gugusan

⁶ China Embassy, "ASEAN Mitra Dagang Terbesar ke-4 Tiongkok", China-Embassy.com 29 juli 2010

<http://id.china-embassy.org/indo/ztbd/zgdmgx/t720264.htm> (diakses pada 11 maret 2018)

⁷ AEDT, "Filipina yakin kerja sama dengan China tidak ganggu Amerika", Radio Australia, 21 desember 2011,

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2007-09-04/filipina-yakin-kerjasama-dengan-china-tidak-ganggu-amerika/85860> (diakses pada 26 september 2017)

ini ditemukan pada tahun 1947 yang dinamakan sebagai Kalayan, sebuah negara baru Kalayan itu yang diartikan sebagai *freedomland*.⁸

Hubungan Filipina dan Tiongkok pada mulanya berjalan sangat baik, menurut sejarah, interaksi antara Tiongkok dan Filipina sudah terjadi dari tahun 982 M, ketika itu pedagang Mindiro dari Filipina datang dan berdagang di pesisir Guangzhou, dagangannya berupa kain rami, mutiara, cangkang penyu, mutiara dan lilin kuning, namun ketika berdagang pun juga membawa kembali sutra, porselen, gelas kaca, manik-manik dan peralatan logam lainnya, yang dibawa langsung dari Tiongkok. Hubungan Tiongkok dan Filipina sudah terjalin karena adanya hubungan perdagangan antara kedua negara tersebut.⁹

Hubungan kerjasama antara Filipina dan Tiongkok mengalami babak baru dengan adanya keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Keputusan ini diajukan oleh Filipina semenjak tahun 2013 pada masa pemerintahan Benigno Aquino III dan baru diterbitkan pada tanggal 12 Juli 2016. Pada keputusan tersebut Filipina dinyatakan mempunyai hak kedaulatan eksklusif terhadap Laut Barat Filipina yang juga merupakan bagian dari Laut Tiongkok Selatan. Selain itu pengadilan juga menetapkan bahwa Tiongkok telah melanggar kedaulatan Filipina melalui tindakan eksplorasi minyak dan membentuk pulau buatan.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ Bayu Arihito, "Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina", Ejournal hi.fisip-unmul.ac.id

¹⁰ BBC, "Apa pengaruh putusan Mahkamah Arbitrase soal Laut Cina Selatan", BBC Indonesia, 12 Juli 2016,

http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/07/160711_dunia_filipina_cina_mahkamah_preview (diakses pada 5 Maret 2018)

Filipina membawa permasalahan ke Mahkamah Arbitrase Internasional disebabkan Tiongkok sering memberikan peringatan terhadap Filipina. Pada tahun 2012 nelayan Filipina diusir dari wilayah *Scarborough Shoal* oleh Tiongkok karena mereka mengklaim daerah tersebut merupakan milik Beijing. Tidak hanya itu kapal-kapal nelayan Tiongkok juga berdatangan ke kawasan kedaulatan Filipina di Laut Tiongkok Selatan. Tindakan Tiongkok tidak pernah berhenti dengan membuat pulau buatan di kawasan Laut Tiongkok Selatan.¹¹

Pejabat Militer Filipina yaitu Wakil Laksamana Alexander Lopez di depan wartawan News Asia pada Kamis, 7 Mei 2015 juga mengatakan bahwa Tiongkok bisa saja melakukan penyerangan udara untuk menegakan zona eksklusif udara di atas kepulauan yang ada di Laut Tiongkok Selatan. Selanjutnya Tiongkok juga menempati 27 hektar pulau-pulau buatan, termasuk dua daerah dekat Pulau Thitu yang dikuasai Filipina, yang juga dikenal dengan Pagasa. Selain itu Tiongkok juga telah menyebarkan penjaga pantai dan kapal angkatan laut di kepulauan Spratly.¹²

Keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional di Den Haag yang diajukan Filipina pada akhirnya menghasilkan respon Tiongkok dengan mengeluarkan Buku Putih yang berjudul "*China Adheres to the Position of Settling through Negotiation the Relevant Disputes between Cina and the*

¹¹ Marcheilla Ariesta, "Cina diduga kembali bangun pulau buatan di Laut China Selatan", Merdeka.com, 7 September 2016, <https://www.merdeka.com/dunia/china-diduga-kembali-bangun-pulau-buatan-di-laut-china-selatan.html> (diakses pada 5 Maret 2018)

¹² Tempo.co, "Krisis Laut Cina Selatan, Cina Peringatkan Kapal Filipina", dunia.Tempo.co, 8 Mei 2015, <https://dunia.tempo.co/read/664670/krisis-laut-cina-selatan-cina-peringatkan-kapal-filipina> (diakses pada 5 Maret 2018)

Phillippines in the South Cina Sea". Buku putih ini kembali menegaskan akan hak Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan sembari mengingatkan negara-negara diluar kawasan Laut Tiongkok Selatan agar menghormati upaya yang dilakukan negara dalam kawasan demi menjaga stabilitas keamanan Laut Tiongkok Selatan.¹³

Hubungan Tiongkok dan Filipina mendapatkan sebuah sandungan besar akan kerjasama yang telah terjalin sangat lama, permasalahan keamanan LTS akan berdampak kepada aspek kerjasama ekonomi kedua negara. Pada awalnya hubungan ekonomi Tiongkok dan Filipina terjalin pada tahun 1975 dimana ketika itu Filipina resmi membuka kembali hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan membuka jalur perdagangan dengan Tiongkok. Hal ini mengakibatkan meningkatnya nilai perdagangan Filipina sampai angka 80.399.309 USD, dan 49% itu berasal dari perdagangan dengan Tiongkok.¹⁴

Kerjasama yang dilakukan antara Filipina dan Tiongkok sangat berpengaruh besar bagi kedua negara, terutama dalam sektor ekonomi, tercatat pada tahun 2010 ada sebesar 27,7 miliar USD nilai perdagangan antara Filipina dan Tiongkok dalam kerjasama bidang perdagangan, investasi dan ekonomi. Hal ini mengalami peningkatan 35% dari tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2008 nilai perdagangan Filipina dan Tiongkok mengalami kenaikan yang

¹³ Erlinda Matondang, "Natuna Pasca Keputusan Arbitrase Internasional" Jurnal Hubungan Luar Negeri Vol 2 No 1 Januari-Juni 2016

¹⁴ Bayu Arihito, "Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina", Ejournal hi.fisip-unmul.ac.id

signifikan, karena hal ini ditandai dengan kontribusi ekspor Filipina mencapai 1/4 dari total ekspor keseluruhan ke Tiongkok atau setara dengan angka 25%.¹⁵

Ekspor buah-buahan tropis berupa pisang dan nanas dikirim dari Filipina ke Tiongkok. Selama ini ada total 82% pisang dan 70% nanas dari pangsa pasar yang ada di Tiongkok yang di impor dari Filipina pada tahun 2012.¹⁶ Tidak hanya ekspor, pertumbuhan investasi antara Tiongkok dan Filipina memperlihatkan prospek kerja yang sangat baik. Menurut data Tiongkok, ada sebesar 86 juta USD investasi riil Tiongkok di Filipina dalam sektor keuangan pada tahun 2010, hal ini mengalami peningkatan 112,5%. Sedangkan Tiongkok menyerap modal Filipina sebesar 11,59 juta USD, meningkat 97,8% dari tahun sebelumnya.

Bidang utama investasi Tiongkok di Filipina adalah sektor pertambangan, manufaktur dan energi listrik. Sedangkan investasi Filipina di Tiongkok adalah berupa bidang properti dan ritel. Hal ini merupakan kerjasama yang sangat penting bagi kedua negara yang saling ketergantungan diatas memperdebatkan sebuah sengketa Laut Tiongkok Selatan yang tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas kerjasama kedua negara tersebut.¹⁷

Kerjasama ekonomi yang telah terjalin, diabaikan oleh pemerintah Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Aquino III dan lebih memilih mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Akan tetapi, pendekatan yang berbeda dilakukan pada masa Presiden Duterte. Pemerintahan

¹⁵ Philexport "Export Trivia" Phillipipine Exporters Confederation, Inc, <http://www.philexport.ph/web/philexp/export-trivia> (diakses pada 5 Maret 2018)

¹⁶ *ibid*

¹⁷ CRI Online, "Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan Tiongkok-Filipina Meningkat", China Radio International, 21 Maret 2011 <http://indonesian.cri.cn/201/2011/03/21/1s117073.htm> (diakses pada 5 Maret 2018)

Duterte terlihat lebih akomodatif terhadap Tiongkok dibandingkan pemerintahan sebelumnya.¹⁸

Pada era Pemerintahan Duterte Filipina lebih cenderung mengupayakan penyelesaian LTS dengan damai, dengan mempromosikan dan meningkatkan perdamaian dan kestabilan kawasan. Presiden Duterte memilih untuk melakukan dialog dengan Tiongkok demi normalisasi hubungan bilateral kedua negara tersebut. Dampak dari pendekatan Filipina pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte ini yaitu sudah diperbolehkannya nelayan Filipina untuk menangkap ikan di perairan *Scraborough Shoal* tanpa di halangi penjaga pantai Tiongkok yang sebelumnya tidak mengizinkan.¹⁹ Sehingga sosok Duterte menjadi harapan baru bagi kejelasan posisi Filipina dalam kepentingannya di Laut Tiongkok Selatan. Apalagi Filipina memiliki sejarah panjang dengan Tiongkok terkait permasalahan Laut Tiongkok Selatan.²⁰

Terbukti melalui inisiasi kerjasama yang diperkuat Duterte saat ini, kerjasama antara Filipina dan Tiongkok melalui ekspor pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari 405.65 juta USD sampai kepada angka 501,20 juta USD.²¹ Selain itu adanya kerjasama dalam investasi Tiongkok di Filipina sebesar 24 miliar USD semakin menunjukkan pentingnya Tiongkok bagi Filipina.²²

¹⁸ Ign.L. Adhi Bhaskara, "Rodrigo Duterte Menangi Pemilu Presiden Filipina", *tirto.id*, 10 mei 2016
<https://tirto.id/rodrigo-duterte-menangi-pemilu-presiden-filipina-8KZ> (diakses pada 22 Januari 2018)

¹⁹ *ibid hal 13*

²⁰ *ibid*

²¹ Bayu Arihito, "Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina", *Ejournal hi.fisip-unmul.ac.id*

²² *ibid*

Adanya perdebatan tentang strategi yang digunakan Filipina terhadap Tiongkok yang terjadi pada peneliti atau ahli yang membahas Sengketa Laut Tiongkok Selatan dilihat dari perbedaan pandangan dalam menganalisa strategi Filipina terhadap Tiongkok, dimana tulisan Evelyn Goh yang berjudul *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, bahwa *hedging* merupakan salah satu strategi penting yang harus digunakan Filipina dalam menghadapi Tiongkok. Karena dalam *hedging* terdapat *engagement* yang memiliki kebijakan *constructive hedge* yang bertujuan untuk mempengaruhi Tiongkok agar mematuhi peraturan dan norma internasional.²³

Selanjutnya menurut ahli Jose L. Sousa-Santos yang merupakan peneliti Hubungan Internasional di *Victoria University of Wellington* dan juga seorang mantan Analis Intelejen dengan Kepolisian Selandia Baru. Jose L Sousa menyebutkan strategi Indonesia dan Filipina dalam merespon tindakan Tiongkok yaitu menggunakan *hedging*.²⁴

Namun peneliti Roland Nikolaus Lochi, Ph.D yang merupakan doktor pada Ludwig Maximilians University, Munich menegaskan dalam tulisannya yang berjudul "*Are the Philippines bandwagoning with the people's Republic of China?*". Bahwa adanya perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Duterte. Filipina menggunakan *balancing* ketika tahun 2011 sampai 2016, dimana adanya keterlibatan dua negara untuk menyeimbangkan kekuatan Tiongkok yaitu USA dan Japan. Namun tulisan ini lebih menuju kepada adanya perubahan

²³ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hlm 2.

²⁴ Jose L. Sousa-Santos, "Achieving a 'Delicate Equilibrium; Are Southeast Asia's Maritime States Indonesia and the Philippines Hedging China, Victoria University

strategi Filipina menjadi *bandwagoning* karena bergabung dengan Tiongkok tanpa mengorbankan klaim Filipina terhadap Laut Tiongkok Selatan namun tetap bisa menjaga stabilitas keamanan kawasan karena sikap Tiongkok sebelumnya cenderung agresif.²⁵

Kemudian menurut ahli Ted Galen Carpenter yang merupakan seorang peneliti senior untuk studi kebijakan luar negeri dan pertahanan di *Cato Institute*, dia adalah penulis sepuluh buku mengenai *international affairs*. Tulisan Carpenter juga berkontribusi dalam *Journal of Strategic Studies*. Dalam tulisannya Carpenter mengatakan bahwa Filipina konsisten melakukan *bandwagoning* terhadap Tiongkok. Presiden Duterte secara terus terang mengatakan akan menunjukkan kerjasama dengan Tiongkok, ditambah lagi tidak akan ada kerjasama militer dengan Amerika Serikat. Karena hal tersebut bisa membuat marah Tiongkok. Kemudian pada bulan oktober di Beijing, Filipina dan Tiongkok menyelesaikan sebuah kesepakatan dengan Tiongkok berupa bantuan sebesar 24 miliar USD.²⁶

Perdebatan ini membuat peneliti tertarik dalam menganalisa strategi yang digunakan Filipina pada pemerintahan Duterte dalam menghadapi Tiongkok dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

²⁵ Roland Nikolaus, PhD, "Philippines bandwagoning with the People's Republic of China", 10 januari 2017, WebsterPolis Internasional Relations, <http://websterpolis.com/are-the-philippines-bandwagoning-with-the-peoples-republic-of-china/> (diakses pada 11 maret 2018)

²⁶ Ted Galen Carpenter, "What are the Philippines and Malaysia doing when it Comes to China (It's Called Bandwagoning)", 5 November 2016, The National Interest <http://nationalinterest.org/feature/what-are-the-philippines-malaysia-doing-when-it-comes-china-18298> (diakses pada 11 maret 2018)

1.2. Rumusan Masalah

Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu wilayah yang menjadi sumber konflik bagi beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Potensi LTS yang merupakan jalur perdagangan penghubung terbesar antara Benua Eropa, Asia Timur, Timur Tengah dan juga Samudera Hindia. Sehingga Tiongkok merasa kedaulatannya di LTS harus diperjuangkan. Dari enam negara yang mengklaim kepemilikan LTS, Filipina menjadi salah satu negara yang kuat menolak klaim Tiongkok tersebut. Hal itu dapat dilihat melalui kebijakan masa Presiden Filipina Benigno Aquino III yang mengajukan permasalahan ini ke Mahkamah Arbitrase Internasional, tindakan ini direspon oleh Tiongkok dengan mengeluarkan buku putih yang berisi peringatan bagi negara-negara sekitar kawasan LTS agar tetap membawa penyelesaian sengketa dengan menghormati negara yang terlibat. Tindakan Aquino ini menjadikan Filipina mengabaikan kerjasama ekonomi bersama Tiongkok yang memiliki kontribusi besar dalam pembangunan kedua negara dan lebih memilih mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional.

Berbeda dengan presiden sebelumnya, presiden baru Filipina yaitu Rodrigo Duterte memilih pendekatan kooperatif dan damai dengan Tiongkok, ditambah dengan pernyataannya ketika berkunjung ke Tiongkok dengan menyatakan Filipina akan kembali mendekati diri ke Tiongkok dan meninggalkan Amerika Serikat (AS). Perubahan ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya perubahan strategi dan perdebatan antara ahli terkait dengan strategi yang digunakan oleh Filipina terhadap Tiongkok, apakah dengan

cara *bandwagonig* atau *hedging*.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka pertanyaan penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah; ***Bagaimana Strategi Filipina menghadapi Tiongkok dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan pada masa pemerintahan Rodrigo Duterte ?***

1.4. Tujuan Penelitian

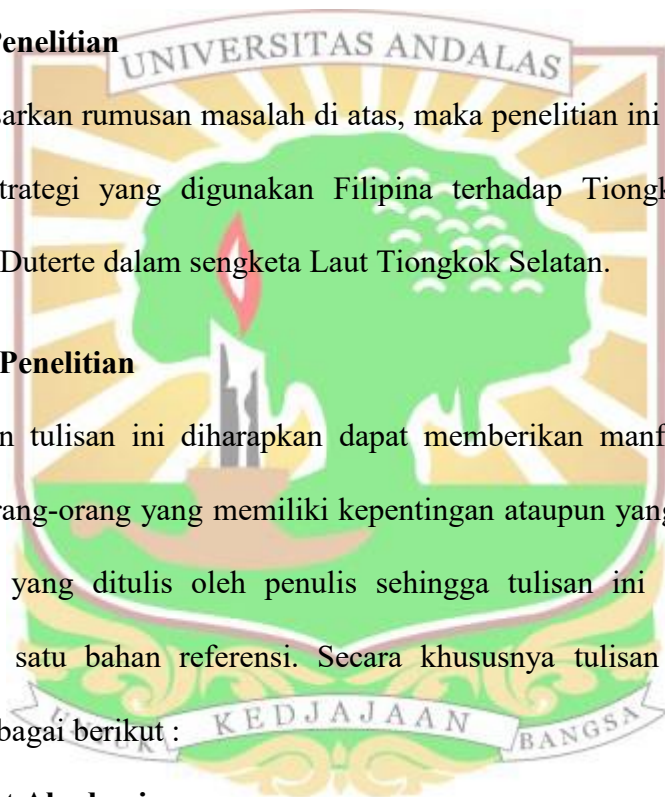
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Filipina terhadap Tiongkok pada masa pemerintahan Duterte dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua elemen dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang ditulis oleh penulis sehingga tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi. Secara khususnya tulisan ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan kajian Ilmu Hubungan Internasional khususnya mengenai hal-hal yang berpengaruh dalam kajian strategi, terutama dalam kajian Strategi negara menghadapi Tiongkok dalam Sengketa Laut Tiongkok selatan dan sekaligus dapat memperkaya topik kajian Ilmu Hubungan Internasional dibidang strategi.



2. Menambah referensi dan kepastakaan Ilmu Hubungan Internasional dalam bidang kajian strategi karena dapat dilihat bahwa negara memiliki strategi dalam melawan sebuah kekuatan besar seperti Tiongkok

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan bagi pemerintah dalam menentukan strategi negara terhadap sengketa kawasan.

1.6. Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini peneliti mencoba mencari sumber yang terjamin keabsahan yaitu jurnal, artikel dan website resmi. Berikut merupakan beberapa jurnal dan artikel yang dipilih peneliti. Pada tulisan “Keamanan Maritim di Laut Cina Selatan: Tinjauan atas Analisa Barry Buzan” ditulis oleh Asep Setiawan seorang penulis Jurnal Kemanan Nasional, tulisannya berbicara tentang pendekatan *Maritime Security* di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan tingkat analisis Barry Buzan mengenai negara yang terlibat dalam konflik tersebut belum menemukan solusi yang tepat. Buzan melihat dalam konteks sistem internasional bahwa jumlah negara yang terlibat konflik Laut Tiongkok Selatan ini terdiri atas Tiongkok, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei Darussalam. Selanjutnya Buzan menggunakan kerangka *Regional Security Complex* yang mana memperlihatkan ciri struktural yang terbagi dalam unit yang ada, sehingga menimbulkan pola *amity* dan distribusi power. Lalu untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok, Filipina secara tidak langsung membuat front bersama dalam menghadapi konflik perbatasan secara maritim. Ini menunjukkan adanya pola *centered*, yang mana negara luar diajak mengimbangi negara yang kuat saat

terjadi konflik perbatasan. Hal ini dapat dilihat dengan keterlibatan negara Amerika Serikat.

Kedua tulisannya Mifta Hanifah, Nanik Trihastuti, dan Peni Susetyorini yang merupakan akademisi dari Universitas Diponegoro yang mana juga berkontribusi dalam Diponegoro Law Jurnal. Dalam tulisannya yang diberi judul “Penyelesaian Sengketa Gugatan Filipina terhadap China Mengenai Laut China Selatan melalui Permanent Court of Arbitration”. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa putusan dari Mahkamah Arbitrase Internasional menciptakan babak baru bagi dinamika keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini berakibat kepada subjek dalam sengketa, dalam hal ini pihak Filipina dan juga Tiongkok. Meskipun putusan ini tidak bersifat mengikat ataupun menekan negara yang kalah dalam pengadilan, namun kedua pihak dituntut untuk tetap menghormati keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional ini, dengan melihat itikad baik dari kedua negara. Selanjutnya penulis juga beranggapan bahwa pernyataan Tiongkok bahwa pihaknya tidak akan memberikan bentuk partisipasi terhadap proses arbitrase ini, karena akan berdampak politis bagi Tiongkok, yang mana putusan ini dapat merusak reputasi Tiongkok di mata internasional. Sebagai suatu negara yang mengabaikan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan Hukum Internasional.

Ketiga ada tulisan Faudzan Farhana merupakan peneliti pada pusat penelitian politik, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Dalam artikelnya dia membahas tentang “*Understanding The Chinese Perspective On Solving Disputes in The South China Sea*”. Tulisannya mengatakan bahwa sebelum tahun

1960an belum ada bentuk ketegangan yang terjadi di Pulau Spratly, namun bentuk klaim ini masih berbentuk dinasti yang mana ada peran Tiongkok dan Vietnam dalamnya. Kemudian masuk kepada tahun 1930an dan 1950an kepemilikannya sering beralih ketangan negara seperti Prancis, Jepang, dan bahkan pihak swasta dan Filipina. Namun masuk periode 1970an akhirnya kemudian Malaysia ikut berperan dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan. Ketegangan baru pun mulai terjadi ketika munculnya UNCLOS yang merupakan hak Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara sejauh 200 mil. Merespon aturan tersebut Brunei Darussalam menerbitkan peta dari landas kontinennya pada tahun 1988 untuk mengklaim 200 mil ZEE.

Selanjutnya pada tulisan ke empat ada tulisan Julio C Teehankee dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs* yang diberi judul “*Duterte’s Resurgent Nationalism in the Philippines: Discursive Institutional Analysis*”, Tulisannya menyebutkan bahwa kehadiran Presiden Rodrigo Duterte pada tanggal 9 Mei 2016 menjadi babak baru bagi demokrasi di Filipina, kepemimpinan Duterte dikhawatirkan menjadi penyebab perpecahan dan menghidupkan lagi kediktatoran yang terjadi di Filipina semasa Ferdinand E Marcos. Hal ini tentu menjadi sebuah sejarah panjang karena Duterte sangat di kenal sebagai Presiden yang menakutkan dan dengan kebijakan yang berani. Selain itu Duterte juga menolak politik pasca Marcos dengan menghidupkan kembali narasi nasionalisme.

Terakhir pada tulisan ke lima adalah tulisannya Renato Cruz De Castro seorang penulis *Journal of Current Southeast Asian Affairs* memberi judul pada

artikelnya yaitu “*The Duterte Administration’s Foreign Policy: Unravelling the Aquino Administration’s Balancing Agenda on an Emergent China*” dalam tulisannya kebijakan luar negeri Filipina pada era Presiden Duterte yaitu dimana kembali mendekatnya Filipina dengan Tiongkok yang mana sebelumnya mengalami ketengangan akibat dari putusan Mahkamah Arbitrase Internasional, namun pada akhir september 2017 yang lalu Presiden Duterte mengumumkan bahwa dia telah membentuk poros aliansi baru dengan Tiongkok dan Rusia. Duterte kembali menghidupkan kembali strategi *equi-balancing* untuk menggantikan kebijakan administrasi Tiongkok. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan suasana politik yang lebih positif antara Filipina dan Tiongkok.

Setelah melihat beberapa penelitian diatas, peneliti menemukan relevansi antara tulisan peneliti sebelumnya dengan isu yang akan dibahas. Sehingga memudahkan peneliti untuk memperkuat argumen dengan data-data yang telah ada. Selain itu sebagai referensi untuk kerangka berpikir peneliti dalam membangun ide-ide dalam kepenulisan.

1.7. Kerangka Konseptual

1.7.1 Konsep *Bandwagoning*

Konsep *bandwagoning* merupakan salah satu konsep utama dalam paradigma realis. Sebelumnya penting kita untuk mendefinisikan *bandwagoning* yang digagas oleh Stephen M. Walt. Menurut Stephen M. Walt *bandwagoning* adalah bentuk kebijakan suatu negara A melakukan aliansi dengan negara B yang dianggap paling mengancam keamanan negara A. *Bandwagoning* dilakukan karena bertujuan membentuk ketentraman (*appeasement*). Dengan melakukan

aliansi dengan koalisi berada di pihak mengancam, maka *bandwagoning* bertujuan untuk menghindari serangan yang ditujukan bagi dirinya dengan pengalihan kepada pihak lain. Sehingga dapat melindungi dirinya ancaman tersebut.²⁷

Negara akan melakukan aliansi dengan pihak yang mendominasi untuk berbagi kepentingan yang sama. Artinya dengan bergabung satu sama lain akan membuat masing-masing negara mendapatkan keuntungan dari akhir pertikaian. Pada motif selanjutnya digunakan dengan alasan *offensive* yang artinya untuk mendapatkan wilayah kekuasaan. Dalam hal ini *bandwagoning* dinilai sangat berbeda dari *balancing*. *bandwagoning* terjadi apabila suatu negara memilih untuk menyesuaikan diri secara strategis terhadap adanya kekuatan yang mengancam, dengan tujuan untuk membatasi ancaman tersebut dan mengambil keuntungan yang baru.²⁸

Dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa Filipina melakukan *Bandwagoning* terhadap Tiongkok yang merupakan negara *rising*. Dalam hal ini *Bandwagoning* yang dilakukan Filipina yaitu dengan menjadikan ancaman sebagai kawan dalam mitranya. Hal ini bertujuan untuk membuat ancaman itu menjadi *interdependency* dengan Filipina. Sekalipun negara yang sudah melakukan *bandwagoning* dan negara tujuan *bandwagoning* seperti Tiongkok bisa saja seketika waktu berubah haluan karena merupakan negara power, namun pada dasarnya ketergantungan ekonomi membuat Tiongkok akan lebih memilih

²⁷ Stephen M. Walt. 1985. "Alliance Formation and the Balance of World Power". *International Security* Vol 9 No 4. The MIT Press. Hal

²⁸ *ibid*

menjaga stabilitas kerjasama ekonomi yang menguntungkan dari kedua negara, ketimbang menjadikan dirinya sebagai *threat* untuk Filipina.²⁹

Sebagai bukti bahwa Filipina dan Tiongkok telah mengimplikasikan kebijakan yang sama sebagai dasar indikator negara melakukan *bandwagoning*, yaitu ketika pada oktober 2016 Presiden Duterte membatalkan patroli gabungan angkatan laut Amerika dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan agar tidak dianggap memprovokasi Tiongkok. Hal tersebut merupakan lanjutan dari kebijakan presiden sebelumnya yaitu Aquino III yang di sebut dengan kebijakan EDCA (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) pada tahun 2014. Kemudian pada pemerintahan Presiden Duterte ada peralihan kebijakan tentang pengamanan Laut Tiongkok Selatan ini dengan dihentikannya kebijakan tersebut dan akan ditinjau ulang. Serta adanya rencana Presiden Duterte untuk melakukan patroli gabungan antara Filipina dan Tiongkok di laut Sulu, untuk meningkatkan keamanan laut teritorial.³⁰

Stephen M Walt menyatakan terdapat beberapa alasan mengapa negara memilih *bandwagoning* terhadap *great power*.

1. Power and Weakness

Negara lemah yang mengalami ancaman dari kekuatan besar dan merasa posisinya tidak aman serta melihat potensi untuk mempertahankan negaranya tidak mempunyai kapasitas yang lebih, maka negara tersebut akan cenderung melakukan *bandwagoning*. Dalam hal ini Filipina yang melihat potensi konflik di

²⁹ *ibid*

³⁰ Bayu Arihito, "Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina", Ejournal hi.fisip-unmul.ac.id (print)

Laut Tiongkok Selatan dengan dominasi Tiongkok serta agresivitas Tiongkok yang membuat Filipina tidak mempunyai kapasitas dalam melawan militer Tiongkok. Seperti yang di paparkan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte yang dilansir *IB Times*, jumat 4 agustus 2017. disampaikan Duterte “Rudal mereka (Tiongkok) bisa mencapai Manila dan saya tidak punya kembang api yang bisa mencapai sejauh itu (Beijing).³¹

2. *The Availability of Allies*

Negara yang lemah akan melakukan *bandwagoning* ketika mereka melihat bahwa mereka tidak memiliki sekutu yang sepadan dan potensial untuk menandingi negara kuat tersebut. dalam hal ini Filipina yang awalnya membawa permasalahan ini diselesaikan lewat ASEAN + Tiongkok. Namun kerap kali tidak menuai hasil yang signifikan karena tidak semua negara memiliki kepentingan yang sama di Laut Tiongkok Selatan, selain itu ASEAN juga menyikapi permasalahan Laut Tiongkok Selatan hanyalah dengan mencegah agar konflik tidak mengarah kepada konflik militer terbuka. Artinya ASEAN hanya menggunakan diplomasi preventif yang tidak memiliki paksaan dalam penekanan konflik tersebut, ditambah lagi prinsip *non-intervensi* yang di miliki oleh ASEAN membuat ASEAN tidak memiliki sebuah kekuatan yang besar yang bisa untuk memaksa konfrontasi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

³¹ Muhaimin, “Duterte; Rudal China bisa hantam Manila, saya tidak punya kembang api” SindoNews.com, Jumat 4 Agustus 2017
<https://international.sindonews.com/read/1227150/40/duterte-rudal-china-bisa-hantam-manila-saya-tak-punya-kembang-api-1501835289> (diakses pada 5 Maret 2018)

3. *The Vulnerability of State*

Negara yang memiliki permasalahan demokratisasi sementara ada disana ketergantungan ekonomi dengan pihak ancaman, maka negara tersebut lebih cenderung memilih *bandwagoning*. tercatat pada tahun 2010 ada sebesar 27,7 miliar USD nilai perdagangan antara Filipina dan Tiongkok dalam kerjasama bidang perdagangan, investasi, dan ekonomi. Hal ini mengalami peningkatan 35% dari tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2008 nilai perdagangan Filipina dan Tiongkok mengalami kenaikan yang signifikan, karena hal ini ditandai dengan kontribusi ekspor Filipina mencapai 1/4 dari total ekspor keseluruhan ke Tiongkok atau setara dengan angka 25%.³²

Ketika terjadi ketergantungan ekonomi terhadap hegemon yang tinggi dalam hal ini Tiongkok, maka akan sulit bagi Filipina untuk melakukan strategi lain, seperti *balancing*. Sederhananya ketergantungan ekonomi yang telah tercipta membuat kedua negara harus menjaga stabilitas keamanan keduanya. Jadi kedua negara harus memiliki arah yang sama tanpa ada kebijakan yang berseberangan yang akan membuat penurunan intensitas kerja sama yang telah tercipta, itulah dasar dari suksesnya *bandwagoning*.

1.7.2. *Hedging*

Hedging adalah salah satu strategi yang bertujuan untuk menghindar, dimana strategi ini merupakan alternatif ketiga suatu negara tidak bisa lagi menggunakan *bandwagoning* dan *balancing*. *Hedging* juga merupakan strategi yang bisa dipilih oleh aktor untuk meminimalisir resiko dan kerugian negara. Goh

³² Philexport "Export Trivia" Phillipipine Exporters Confederation, Inc, <http://www.philexport.ph/web/philexp/export-trivia> (diakses pada 5 Maret 2018)

mendefenisikan bahwa *hedging* ini bertujuan untuk menghindari sebuah situasi ketiga negara tidak melakukan *balancing* ataupun *bandwagoning*.³³

Seperti yang ditegaskan oleh Goh dalam *Understanding 'Hedging' in Asia-Pacific Security*.

A set of strategies aimed at avoiding (or planning for contingencies in) a situation in which states cannot decide upon more straightforward alternatives such as balancing, bandwagoning, or neutrality. Instead they cultivate a middle position that forestalls or avoids having to choose one side (or one straightforward policy stance)

dalam buku karangan Evelyn Goh yang berjudul *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*, yang menyatakan terdapat elemen penting dalam *Hedging* yang sesuai dengan analisis penelitian adalah *hedging* memerlukan engagement yang kompleks dengan Tiongkok pada politik, ekonomi, dan strategi dengan harapan Pemimpin Tiongkok dapat dipengaruhi atau di sosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma internasional. Dimana kalau kita lihat kebijakan dari engagement ini dapat dipahami sebagai *constructive hedge* yang mana bertujuan untuk mempengaruhi Tiongkok dan merespon bentuk agresivitas dominasi potensial Tiongkok. Selain itu *engagement* berusaha mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya pada masyarakat internasional, sehingga akan berdampak kepada aksi para pemimpin yang lebih ke arah damai.³⁴

Kebijakan *engagement* adalah sebuah kebijakan yang mengacu pada penggunaan sarana *non-coersive* dalam memperbaiki elemen *non-status quo* dari

³³ Johnston dan Ross (1999) dalam Kong dalam Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 3.

³⁴ Evelyn Goh. 2005. *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*. Washington: East West Center. Hal 2.

sebuah negara yang mendominasi dari segi power. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa negara yang memiliki power yang ada dalam tatanan internasional digunakan dengan cara yang konsisten dengan perubahan damai dalam tatanan regional dan global.³⁵

Bentuk paling umum dari *engagement* adalah sebuah kebijakan yang mencoba menyelesaikan sengketa internasional dengan mengakui negosiasi dan kompromi dengan rasional. Sehingga *engagement* menilai bahwa negosiasi dengan rasional akan lebih baik digunakan dengan tujuan menghindari konflik sampai pada konflik kekerasan dan menggunakan persenjataan yang mungkin akan merugikan pihak yang berkonflik. *Engagement* lebih dari sekedar *appeasement*. *Engagement* ini mencakup usaha untuk mempengaruhi negara power untuk menerima tatanan yang telah ada.³⁶

Tujuan utama kebijakan *engagement* adalah meminimalkan konflik dan menghindari perang tanpa mengorbankan integritas tatanan internasional yang ada. Intinya, kekuatan yang mapan berusaha mengembalikan keseimbangan sistem dengan menyesuaikan tatanan internasional dan pembagian wilayah sesuai dengan keseimbangan kekuatan global yang baru.

Engagement memiliki tiga tujuan penting lainnya.

1. *Engagement* memungkinkan kekuatan status quo untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai ambisi nyata dari negara yang *rising power*.

³⁵ Randall L. Schweller, 1999, *Managing the Rise of Great Powers: History and Theory*. London and New York:Routledge. Hal 14

³⁶ *ibid*

2. *Engagement* adalah kebijakan yang berguna untuk mempersiapkan suatu negara dalam menerima perubahan tatanan internasional yang seketika bisa berubah dan memungkinkan perang bisa terjadi.
3. *Engagement* dapat digunakan untuk merespon aliansi yang berbahaya yang bisa saja terjadalam tatanan internasional. *Engagement* dapat dilihat sebagai alternatif pembentukan aliansi counter balancing untuk merespon aliansi saingan.³⁷

Seperti yang ditunjukkan Martin Wight:

It is no good a satisfied power (let us say, Philip II's Spain) telling a dissatisfied power (let us say, Elizabethan England) that its legitimate interests can be fully secured within the existing arrangement of power, for there will be no possibility of agreement between what Spain calls "legitimate" and what England calls "vital".

Masalah lain dalam menjalankan strategi *engagement* adalah harapan kedua belah pihak sering menyimpang sesuai dengan motivasi negosiasi mereka yang berbeda. Kekuatan *status quo* menginginkan perubahan dalam perilaku kekuasaan *revisionis*, sementara yang terakhir menginginkan perubahan dalam urutan *status quo*. Konsekuensinya, dengan kekuatan *status quo*, keterlibatan melibatkan penggunaan penghargaan dan ancaman untuk mempengaruhi negara *revisionis* sehingga berperilaku lebih sesuai dengan peraturan tatanan yang telah mapan. Kekuatan yang tidak puas. Sebaliknya, melihat *engagement* sebagai alat merubah tatanan yang ada ke arah damai. Pertama yang harus diingat bahwa pengelolaan masalah dalam merubahnya ke arah damai tidak selalu bergantung pada kekuatan yang besar saja. Namun agar prosesnya berjalan, kekuatan atau negara *status quo* harus menunjukkan empati, keadilan dan perhatian yang tulus

³⁷ *Ibid* 14-15

untuk tidak menyinggung prestise dan kehormatan nasional dari negara yang memiliki power.³⁸

Kemudian Goh juga mengkategorikan *hedging* atas tiga indikator yang mana bertujuan untuk menentukan sikap negara lemah terhadap negara *rising powers*, Indikator tersebut terdiri dari ;

1. ***Indirect (soft balancing)***

Dalam *soft balancing* negara yang berada dalam ancaman akan berusaha mencari *major power* lain yang bisa dijadikan penyeimbang /counter untuk melawan kekuatan besar tersebut (Tiongkok)

2. ***Complex Engagment***

Artinya Negara perlu mempertimbangkan beberapa aspek politik, ekonomi dan juga level strategis dalam menentukan sikapnya.

3. ***Great Power Enmeshment***

Beberapa negara regional *great power* diberikan posisi yang stabil.

Hedging membuat negara leluasa untuk mengimbangi dan juga mengurangi resiko serta ancaman dalam hubungannya dengan *regional power* tanpa harus berkonfrontasi dengan mereka dan dalam prakteknya tetap melakukan kerja sama dengan pihak manapun. Dalam melakukan *hedging* mereka bisa berkomitmen dengan organisasi regional untuk mencari solusi dalam permasalahan dan disatu sisi juga menjaga hubungan bilateral yang produktif dengan negara lawan.³⁹

³⁸ *Ibid* 15-16

³⁹ *Ibid*

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Dalam metode ini dijelaskan secara sistematis mengenai fakta-fakta ataupun variabel-variabel yang menandai strategi Filipina terhadap Tiongkok dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan.

1.8.2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah strategi Filipina dalam menghadapi Tiongkok dalam Sengketa Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu batasan waktu yang penulis gunakan adalah masa pemerintahan Duterte pada tahun 2016 sampai tahun 2018.

1.8.3. Jadwal Penelitian

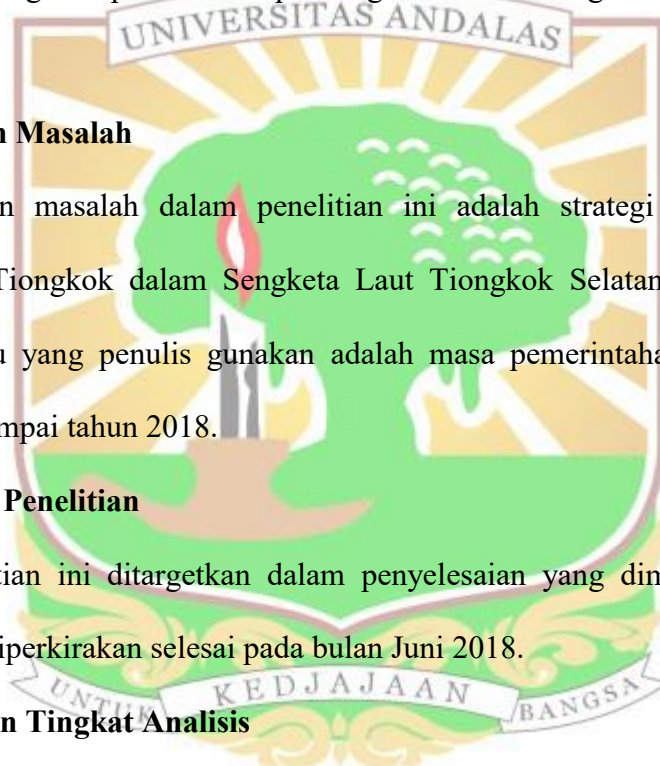
Penelitian ini ditargetkan dalam penyelesaian yang dimulai dari bulan februari dan diperkirakan selesai pada bulan Juni 2018.

1.8.4. Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisisnya adalah Negara Filipina. Sedangkan unit eksplanasi pada penelitian ini adalah Negara Tiongkok.

1.8.5. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek di mana data dapat diperoleh.



Sumber data penelitian adalah sumber data sekunder yaitu buku, koran dan artikel jurnal terkait Negara Filipina dan Tiongkok dalam isu Laut Tiongkok Selatan. Terdiri dari *White Paper* Tiongkok yang berjudul “*China Adheres to the Position of Settling through Negotiation the Relevant Disputes between Cina and the Phillipines in the South Cina Sea*” pada tahun 2016. Kemudian jurnal utama yang digunakan adalah tulisan Evelyn Goh “*Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asia Regional Security Strategies*” kemudian tulisan M Stephen Walt “*Alliance Formation and the Balance of World Power*” dan terakhir tulisan Bayu Arihito “Pengaruh Kepemimpinan Presiden Duterte terhadap Hubungan Bilateral Filipina dengan Cina”.

Teknik Pengumpulan Data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan merupakan alat bantu yang dipilih serta digunakan oleh peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan sistematis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan atau masalah yang telah dirumuskan, dan yang pada akhirnya akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan.⁴⁰

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan.⁴¹ Kegiatan penelitian yang akan dilakukan adalah pertama mencari dan mempelajari sumber-sumber informasi berupa penelitian-penelitian sebelumnya, jurnal-jurnal, referensi-referensi dan dokumen terkait

⁴⁰Dodiet Aditya, “Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian”
<https://akupunktursolo.files.wordpress.com/2013/03/data-teknik-pengumpulan-data.pdf> (diakses Pada 27 Juni 2018)

⁴¹*Ibid*, 261.

penelitian penulis. Kemudian setelah data terkumpul, penulis akan mendeskripsikan dan menganalisis data dengan menggunakan konsep yang telah dijelaskan sebelumnya.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dimana peneliti akan menampilkan beberapa fakta yang terjadi yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya yang menggambarkan strategi Filipina terhadap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Teknik analisis data dalam penelitian ini berangkat dari kepentingan negara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Pertama penulis akan memilah data yang berhubungan dengan strategi Filipina di LTS, Strategi Tiongkok di LTS, Potensi LTS dan tumpang tindih hubungan kedua negara di LTS. kemudian dari data-data tersebut penulis akan menganalisa berdasarkan dua strategi *bandwagoning* menurut Waltz dan *hedging* menurut Evelyn Goh.

1.9. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang akan menggambarkan fakta - fakta penting mengenai isu yang penulis angkat, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual serta metodologi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini. Pendahuluan akan memberikan gambaran mengenai penelitian yang akan penulis teliti.

BAB II Peran Strategis Tiongkok dan Filipina di Laut Tiongkok Selatan

Bab ini akan menjelaskan mengenai peran strategis kedua Negara Filipina dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, peran berbicara tentang kepentingan kedua negara di kawasan tersebut, kerjasama ekonomi, serta potensi stabilitas keamanan di Laut Tiongkok Selatan.

BAB III Kebijakan Duterte terhadap Tiongkok terkait LTS

Bab ini akan menjelaskan mengenai Kebijakan Filipina terhadap Tiongkok terkait dengan penyelesaian sengkera Laut Tiongkok Selatan.

BAB IV Strategi Filipina menghadapi Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan

Bab ini akan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Filipina dalam menjaga stabilitas keamanan kedua negara dalam kawasan Laut Tiongkok Selatan tanpa berimbas kepada kerjasama ekonomi yang saling mengikat antara kedua negara.

BAB V Penutup

Bab ini menyediakan kesimpulan dari penelitian sesuai dengan pertanyaan penelitian.

